***RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Kantor Polres Sorong Kota)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat*

*Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)*

*pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*

**

**Disusun Oleh:**

**Ihsan Farhan Majid**

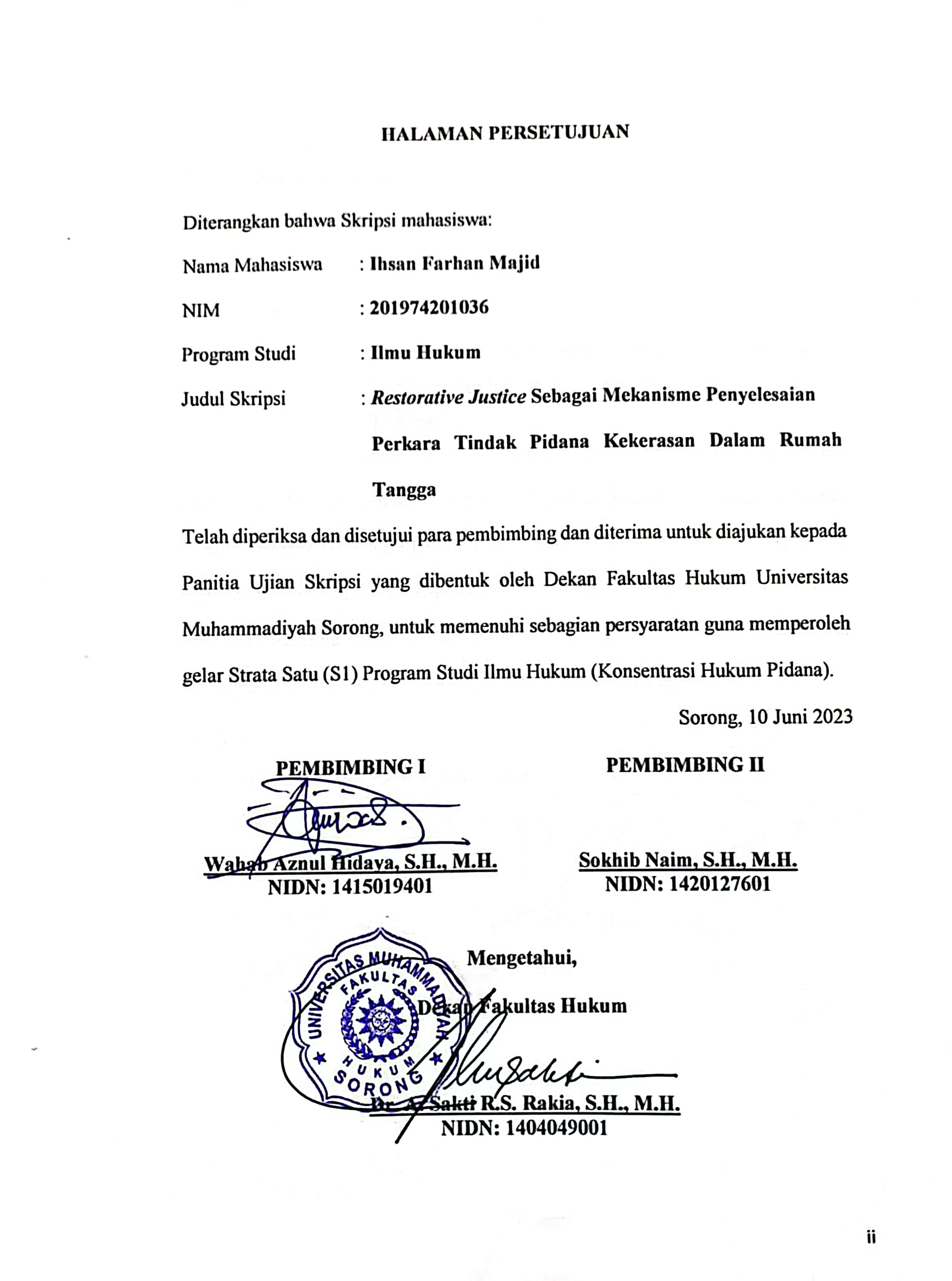
**201974201036**

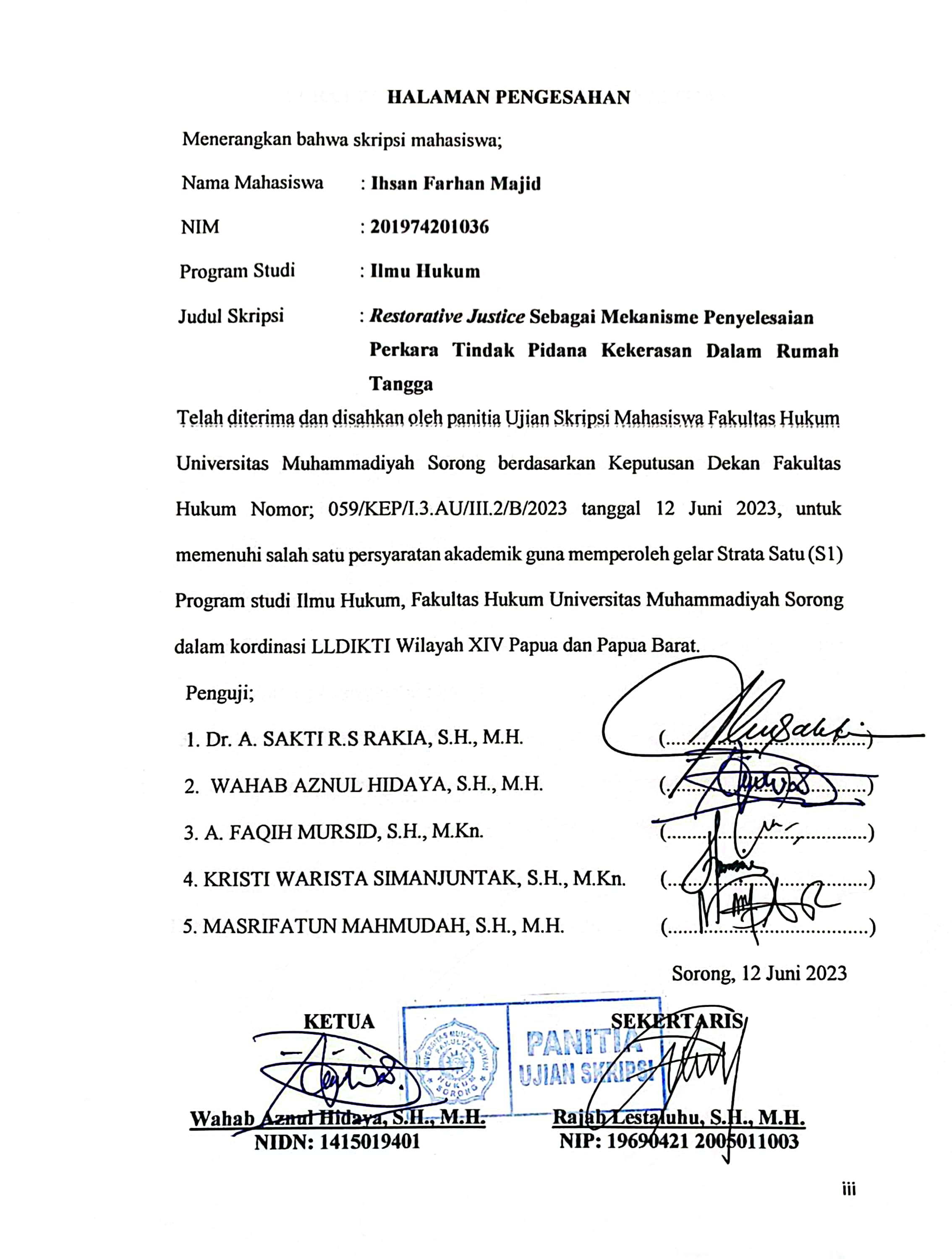
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

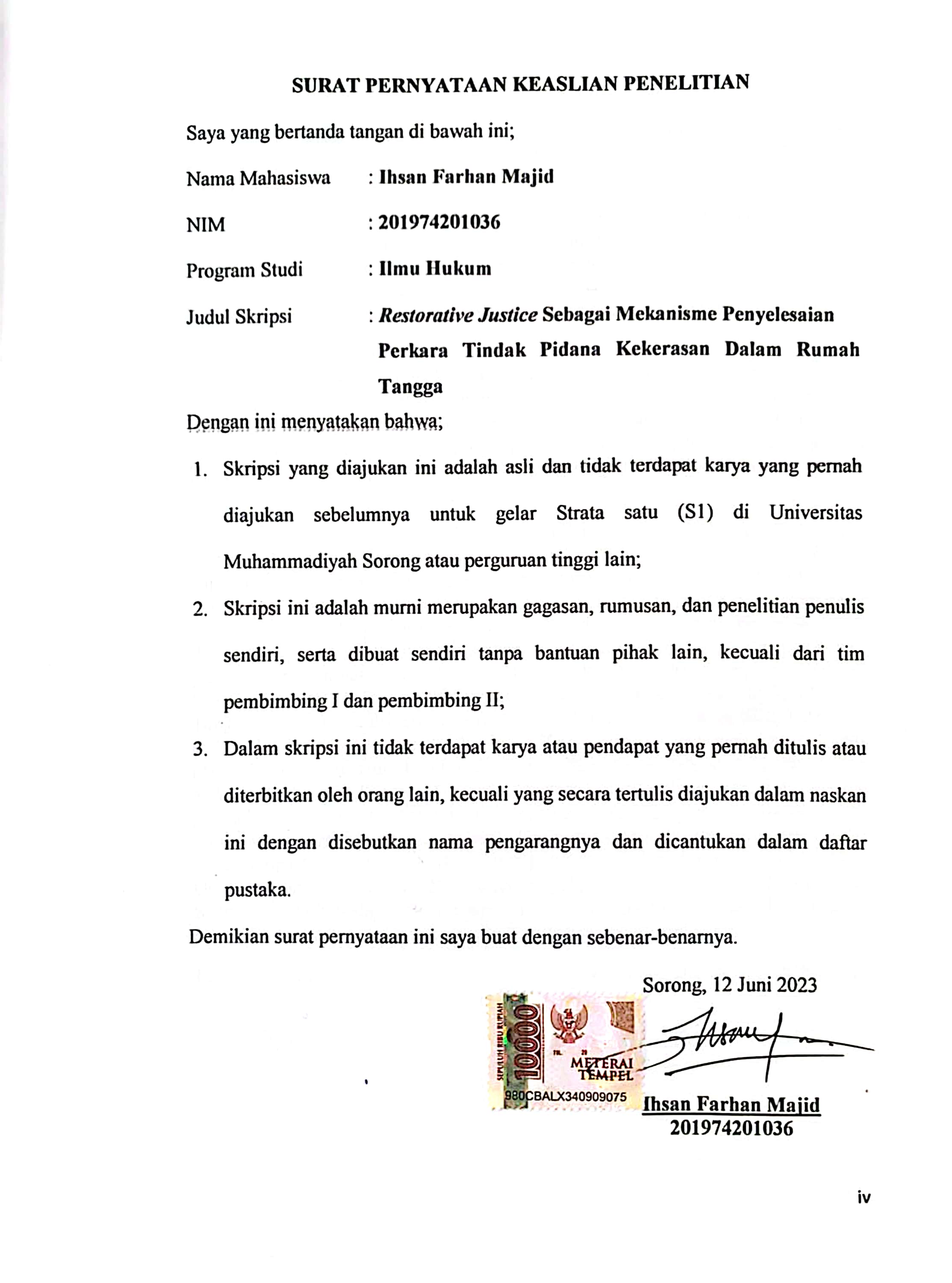
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

**TAHUN 2023**

****





# ABSTRAK

Ihsan Farhan Majid, *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (dibimbing oleh Wahab Aznul Hidaya, dan Sokhib Naim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak Kepolisian di Kota Sorong; mengetahui upaya serta hambatan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan mendepankan pendekatan *restorative justice*.

Penelitian yang digunakan, melalui pendekatan Yuridis Empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (literature hukum), dan data tersier, yakni diperoleh dari kamus hukum/buku hukum/peraturan perundang-undangan dan kamus besar bahasa Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Penerapan Pendekatan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya penerapan *restorative justice* sudah diterapkan oleh masyarakat adat sejak tahun 1960-an sebagai konsep penyelesaian perkara yang mengutamakan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara tanpa melibatkan aparat. Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan, terdapat tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. (2) Upaya Penyelesaian Restorative Justice Dapat Menjadi Alternatif Yang Lebih Baik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa disebut dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) secara umumnya dipergunakan dalam lingkungan perkara-perkara perdata, tidak hanya tanpa terkecuali perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada beberapa metode penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alternatif, konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penilaian ahli.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Mekanisme, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dari-Nyalah hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“*RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** sebagai persyaratan untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Pada kesempatan ini penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.M.,M.H. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong;
2. Bapak Dr. A. Sakti R.S. Rakia, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong;
3. Bapak Wahab Aznul Hidaya, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, dan sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah bersedia mambantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan, penulisan dan penelitian Skripsi;
4. Bapak Sokhib Naim, S.H.,M.H. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia mambantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan, penulisan dan penelitian Skripsi;
5. Kepada seluruh para Dosen dan Staf Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong;
6. Kepada kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Tercinta penulis yang memberikan semangat dan dukungan serta doa selalu dalam menyusun Skripsi;
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat di luar rumah atau di kampus;

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat dibutuhkan demi penyempurnaannya. Skripsi ini kiranya dapat menjadi suatu sumbangan pikiran positif dalam rangaka pengembangan Ilmu Hukum. Semoga bermanfaat.

Sorong, 12 Juni 2023

Penulis,

Ihsan Farhan Majid

Nim: 201974201036

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL ...........................................................................................i**

[HALAMAN PERSETUJUAN ii](#_Toc137243815)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc137243816)

[SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iv](#_Toc137243817)

[ABSTRAK v](#_Toc137243818)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc137243819)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc137243820)

[BAB I](#_Toc137243821) [PENDAHULUAN 1](#_Toc137243822)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc137243823)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc137243824)

[C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6](#_Toc137243825)

[D. Sistematika Penulisan 7](#_Toc137243826)

[BAB II](#_Toc137243827) [TINJAUAN PUSTAKA 9](#_Toc137243828)

[A. Pengertian Hukum Pidana 9](#_Toc137243829)

[B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 12](#_Toc137243830)

[C. Pengertian *Restorative Justice* 14](#_Toc137243831)

[D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 21](#_Toc137243832)

[BAB III](#_Toc137243833) [METODE PENELITIAN 26](#_Toc137243834)

[A. Jenis Penelitian 26](#_Toc137243835)

[B. Lokasi Penelitian 27](#_Toc137243836)

[C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 27](#_Toc137243837)

[D. Teknik Pengumpulan Data 28](#_Toc137243838)

[E. Analisis Data 29](#_Toc137243839)

[F. Waktu Penelitian 29](#_Toc137243840)

[BAB IV](#_Toc137243841) [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31](#_Toc137243842)

[A. Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 31](#_Toc137243843)

[B. Upaya Penyelesaian *Restorative Justice* Dapat Menjadi Alternatif Yang Lebih Baik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 42](#_Toc137243844)

[BAB V](#_Toc137243845) [PENUTUP 51](#_Toc137243846)

[A. Kesimpulan 51](#_Toc137243847)

[B. Saran 53](#_Toc137243848)

[DAFTAR PUSTAKA 55](#_Toc137243849)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin hubungan erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lainnya. Hubungan erat antara manusia dan manusia yang lainnya menunjukan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri (individual) artinya bahwa mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sendirian, mereka akan melengkapi satu dan yang lainnya. Oleh karena itu manusia menciptakan suatu peraturan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kehidupan didalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan ini menjadi tertib.[[1]](#footnote-1) Tatanan yang disepakati oleh masyarakat untuk menangani konflik atau untuk menjaga ketertiban dituangkan dalam pembuatan peraturan yang mengikat seluruh anggota masyarakat (kontrak sosial).

Suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat, kesadaran masyarakat akan perlu adanya sebuah kontruksi untuk menjaga ketertiban dipandang sebagai awal terbentuknya hukum. Akan tetapi menurut Satjipto Rahardjo bahwa untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat tidak hanya ditimbulkan karena adanya hukum akan tetapi munculnya norma ataupun kaedah yang ada pada masyarakat juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.[[2]](#footnote-2)  Ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada didalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini diciptakan oleh suatu badan hukum yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Menuru Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik *(nomodynamics)*. Artinya bahwa hukum muncul dan terbentuk dari diri seseorang sedangkan norma bersifat otonom yakni datang dari diri seseorang itu.[[3]](#footnote-3) Walaupun ada faktor lain yang menunjang untuk terbentuknya suatu ketertiban diluar hukum, akan tetapi hukum mempunyai peran yang besar dalam andil menciptakan ketertiban itu. Hal tersebut dapat terjadi karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, baik mereka setuju ataupun tidak dengan peraturan-peraturan tersebut. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah diberlakukan tetapi tetap masih ada saja yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan tentu saja dikenakan hukuman atau diberikan sanksi.

Hukum dalam tatanan masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan hukum tersebut dapat menjamin hak-hak individu dari seseorang seperti halnya hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk kebebasan berpendapat, dan hak untuk beribadah. Sehingga dimata hukum semua subjek hukum sama derajatnya dan tidak dibanding-bandingkan. Menurut Mokhammad Najih ada beberapa hal yang menjadikan hukum dibutuhkan didalam masyarakat, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi.
2. Menjaga agar tidak terjadinya konflik antara anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup masyarakat dapat tercapai.
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat seimbang dan dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik.
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.[[4]](#footnote-4)

Adapun segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dalam hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan, serta perbuatan berbuatan apa saja yang dilarang terhadap ketentuan umum, bersifat memaksa bagi seluruh anggota masyarakat, adapun yang melanggarnya akan diberikan hukuman pemidanaan.

Pemidanaan adalah salah satu bentuk hukum yang diterapkan dalam masyarakat untuk memberikan sanksi bagi masyarakatyang melakukan tindak penyimpangan terhadap tatanan sosial ataupun melakukan sebuah kejahatan. Pidana dipandang sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan tujuan terakhir tapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan. Karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.[[5]](#footnote-5)

Pemidanaan di Indonesia sebagaimana yang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.[[6]](#footnote-6) Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah melaksanakan aktifitas pemerintahan harus berlandasan hukum yang telah diciptakan. Indonesia sebagai negara hukum telah megatur hukum yang bersifat publik maupun hukum yang bersifat privat. Dalam menerapkan hukum publik ataupun hukum privat, negara Indonesia masih menerapkan prodak hukum warisan dari Belanda ketika masa penjajahan. Seperti persoalan tentang pelanggagran dan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peersoalan tentang hak-hak dan kepentingan individu atas kepemilikan barang atau benda serta tentang perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Adapun kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di ruang lingkup keluarga, contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru dalam perkara pidana. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah seorang perempuan atau istri, negara harus memberikan perlindungan terhadap korban agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan, ataupun perlakuan yang merendahkan martabat seseorang. Adapun penyelesaian perkara di Indonesia terbagi menjadi pendekatan *retributive justice* yang berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, dan pendekatan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Pada praktiknya pendekatan *restorative justice* sering diterapkan perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti perkara lalu lintas yang menimpa Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani dan perkara kekerasan dalam rumah tangga Lesty Kejora dan Rizky Billar. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemidanaan kekerasan rumah tangga dari sudut pandang *restorative justice*, maka penulis termotivasi menyusun skripsi yang berjudul : **“*RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah penyelesaian *restorative justice* dapat menggantikan atau menjadi alternatif yang lebih baik daripada sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana dalam rumah tangga?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep *restorative justice* dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui penyelesaian *restorative justice* dapat menggantikan atau menjadi alternatif yang lebih baik daripada sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana dalam rumah tangga atau tidak.
3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, ialah;

1. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
2. Menambah bahan kajian dan sumber informasi sebagai suatu referensi bagi para akademisi lain yang membutuhkannya dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang mana berkaitan dengan permasalahan atau pokok perkara kekerasaan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan metode pendekatan keadilan restoratif.
3. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsi pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dan pemidanaan di Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan berlaku samapai saat ini.
4. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan agar dapat diketahui masyarakat luas mengenai informasi tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan keadilan restoratif.

## D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis memberikan sistematika penulisan yang terdiri dalam 5 (lima) bagian, mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus kajian pemabahasan dan tujuan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu sebagai berikut;

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai aspek hukum atau konsep yang digunakan dalam penelitian dan diambil dari beberapa referesnsi yang sesuai dengan pokok permasalah yang dikaji tentang pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang berisi sub bab yaitu; pengertian hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana, pemgertian *restorative justice*, dan pengertian kekerasan dalam rumah tangga.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan waktu penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan *restorative justice* sebagai mekanisme dan upaya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran untuk pembaca.

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straaf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman, *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Mr. W.P.J. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.[[7]](#footnote-7) Jadi Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk:[[8]](#footnote-8)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat  
   dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan  
   tersebut.

Sedangkan menurut Adami Chazawi, Hukum Pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:[[9]](#footnote-9)

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan  
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di manasyarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana dalam arti Subjektif dibedakan menjadi dua, yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan dimana tindakan seseorang termasuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Menurut Mueljatno, tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemah kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kemudian kata *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.[[13]](#footnote-13) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak terdapat penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.[[14]](#footnote-14)

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana umumnya adalah manusia. Ancaman pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya, menunjukan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person.*[[15]](#footnote-15)

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Karena tentu saja tindak pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.[[16]](#footnote-16)

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pribadi, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.[[17]](#footnote-17) Sedangkan Komariah E. Sapardjaja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuaatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaku yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesusai dengan tindak pidana atau perbuatan yang ia lakukan.

## C. Pengertian *Restorative Justice*

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan ”*justice*” yang artinya keadilan. Dengan demikian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan. Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi adamya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai sebagai pemulihan terhadap kerugian yang didapat oleh korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sedangkan dimensi keadilan ditunjukan kepada keadilan individu yaitu keadilan bagi korban.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[[19]](#footnote-19)

Pengertian *restorative justice* dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka, dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukan dalam kasus pidana dalik ringan.[[20]](#footnote-20) Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi pidana delik ringan, akan tetapi dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tatacara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan). Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi, “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf ke 2 bagian ini”.[[21]](#footnote-21)

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai *restorative justice* antara lain:

1. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akiabat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.[[22]](#footnote-22)
2. Mariam Liebmann secara sederhan mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.[[23]](#footnote-23)
3. Menurut W. Tommy Watuliu (Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (Staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan.[[24]](#footnote-24)

Tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mendepankan penghukuman saja. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilam restoratif kejahata dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penarapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan resitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan retorasi sebagai tujuan utama.[[25]](#footnote-25)

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:[[26]](#footnote-26)

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpatisipaasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasikan aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tundingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
3. Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). [[29]](#footnote-29)

Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, penghukuman bukanlah hal dasar di dalam hukum adat maupun pada konsep keadilan restoratif. Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan besar. Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu, diatur hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Mengingat hukum adat di Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dengan konsep keadilan restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sebelum masa penjajahan. Hal ini kemudian membuka peluang perluasan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya dapat diterapkan kepada anak, tetapi juga orang dewasa.[[30]](#footnote-30)

## D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga adalah organisai kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi di Indonesia kerap kali dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh tiga actor tadi akan tetapi saudara baik itu saudara kandung ataupun saudara tiri. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tanga yang bekerja dan tinggal bersama rumah tangga tersebut.[[31]](#footnote-31)

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.[[32]](#footnote-32) Sedangkan perkawinan menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mustqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.[[33]](#footnote-33)

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tenteng kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak beleh mengetahuinya, apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi.[[34]](#footnote-34)

Kekerasan terhadap anggota keluarga di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang sering terjadi di dalam keluarga berupa:[[35]](#footnote-35)

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan.

1. Kekerasan psikis

Kekerasan ini merujuk pada serangan terhadap kondisi mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat substansial melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

1. Kekerasan seksual

Kekerasan ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/atau sekual atau produksi misalnya pelecehan sekual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, pemerkosaan (termasuk menggunakan alat/bukan alat kelamin), perbudakan sekual, pemukulan dan lain-lain yang menyertai hubungan intim, bisa sesudah atau setelah hubungan intim dan lain sebagainya. Kekeraan yang dilakukan biasanya disertai dengan kekerasan- kekerasan lain, baik kekerasan fisik, pesikis atau kekerasan ekonomi. Yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/ reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental.

1. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang banyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam kontruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri tetapi tidak sedikit dari merka yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja akan tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan dalam masyarakat. KDRT bukan sekedar percekcokan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan percekcokan. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peranan gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri atau suami, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban KDRT karena memang budaya patriaki yang masih ada di masyarakat Indonesia.[[36]](#footnote-36)

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagiamana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap perbuatan terhdap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[37]](#footnote-37)

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang istri memilki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak juga sedikit yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik terjadi dalam berbagai rupa. Dari mulai menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, dan beberapa kekerasan yang menggunakan benda-benda yang mematikan ataupun tidak. Dalam beberapa kasus yang terjadi banyak wanita yang menjadi korban kekerasan mengalami luka berat hingga mengakibatkan cacat, bahkan sampai pada kematian. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, akan tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbanya[[38]](#footnote-38).

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas; penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer data primer yang diperoleh di lapangan.[[39]](#footnote-39)

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[[40]](#footnote-40) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[41]](#footnote-41)

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Kantor Polres Sorong Kota. Alasan penulis meneliti disini karena di Kantor Polres Sorong Kota mendepankan pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, jenis dan sumber yang digunakan sebagai berikut;

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian Yuridis Normatif ini merupakan suatu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan.

* 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 205 ayat (1) tentang Tindak Pidana Ringan.
  3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini meliputi buku-buku (literature) yang berkaitan dengan ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang masih relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diperoleh atau di ambil dari pendapat para ahli hukum, asas-asas, teori-teori yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan internet.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian skripsi ini, mengambil istilah dan makna yang bersumber dari Kamus Hukum/Buku Hukum/Peraturan Perundang-undangan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh atau mendapatkan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk penelitian srkipsi ini. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber kepustakaan yang telah ada. studi ini dilakukan dengan meneliti buku, karangan ilmiah/karya tulis ilmiah, peraturan perundang- undangan, dan akses internet. Yang mana dilakukan dengan mengakses website-website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada, serta mempelajari, mengkaji dan menganilis hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut.

## E. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *deskriptif*, yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai peranan penegak hukum dalam penyelesaiaan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*. Wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatifuntuk menghasilkan data yang bersifat *deskriptif*.

## F. Waktu Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Waktu yang dipergunakan penulis untuk melakukan penelitan dimulai dari perumusan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan. Waktu yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, penulisan ini dilakukan selama periode bulan Oktober Tahun 2022 hingga bulan Juni 2023. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam waktu penelitian, meliputi; pengumpulan data, penyusunan data dan proses penulisan dari semua hasil data yang telah diperoleh atau didapatkan.

**Tabel 1**

**Waktu dan kegiatan penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KETERANGAN** | **WAKTU** | | | | | | | | |
| **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** |
| **1.** | **Penagajuan Judul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Penyusunan Proposal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Bimbingan Dosen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Seminar Proposal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Penyusunan Skripsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Bimbingan Dosen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Ujian Skripsi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pengajuan judul dimulai pada tanggal 8 (delapan) Oktober dan disetujui pada tanggal 12 (dua belas) Oktober 2022. Proses penyusunan proposal skripsi dari tangaal 13 (tiga belas) Oktober 2022 hingga tanggal 31 (tiga puluh satu) November 2022, keseluruhan rangkaian tersebut kurang lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dan bimbingan proposal skripsi dijadwalkan pada tanggal 5 (lima) Desember 2022, dan melaksanakan seminar proposal pada tangga 6 (enam) Maret 2023. Proses penyusunan skripsi dan penelitian dari tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2023 hingga tanggal 7 (tujuh) Juni 2023, keseluruhan rangkaian tersebut kurang lebih dalam kurung waktu 1 (satu) bulan dan bimbingan di jadwalkan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2023, dan melaksanakan sidang skripsi pada tanggal 12 (dua belas) Juni 2023.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Restorative justice* merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini mengutamakan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Awal mulanya, *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Menurut Liebmann, restorative justice merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.[[42]](#footnote-42) Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:[[43]](#footnote-43)

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Ketika berbicara tentang *restorative justice*. Pertama, *restorative justice* menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[[44]](#footnote-44)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota yaitu:

“Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang itu sendiri merupakan delik aduan jadi apabila belum dimulainya sidang di pengadilan korban dapat menarik atau mencabut laporannya. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga sendiri yaitu dengan cara mendiskusikan masalah yang terjadi guna mendapatkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, untuk memilih meyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini di luar pengadilan.”[[45]](#footnote-45)

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan undang-undang ini terdapat beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual, dan
4. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan kategori yang digolongkan pada undang-undang diatas, tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan. Beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai delik biasa. Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan diatur dalam Pasal 51 hinggal Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut pasal-pasal ini, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk delik aduan meliputi:

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
3. Tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Adapun kaitannya perkara delik aduan dengan penyelesaian menggunakan konsep pendekatan *restorative justice*, karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang berkepentingan maka dalam hal ini terbukanya kemungkinan bagi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, sebagai penyelesaian perkara yang tidak dicampuri tangan penegak hukum.

Sebagai sebuah konsep dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, pendekatan *restoratve justice* memuat tiga konsep utama yang masing masing adalah:[[46]](#footnote-46)

1. Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individuyang mengakibatkan penderitaan korban, masyarakat dan pelaku sendiri dan hanya sekunder sebagai pelanggaran terhadap negara.
2. Tujuan dariproses peradilan pidana harus ditujukan untuk menciptakan perdamaian dimasyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki penderitaan akibat konflik tersebut.
3. Proses peradilan pidana harus memfasilitasipartisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota tentang manfaat menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tanggayaitu:

“Manfaat menerapkan pendekatan *restorative justice* itu sendiri dapat menyelesaikan perkara tindak pidana lebih cepat dari pada waktu dilimpahkan ke persidangan hingga tidak harus menunggu waktu 2 sampai 3 bulan dan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri merupakan salah satu perkara tindak pidana yang paling banyak menggunakan konsep *restorative justice*.”[[47]](#footnote-47)

Terkait dengan hasil wawancara diatas sesuai dengan pernyataan Satjipto Raharjo, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.[[48]](#footnote-48)

Penerapan pendekatan keadilan restoratif lebih dikenal sebagai istilah *non state justice system* (peran negara dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi menjadi tidak ada sama sekali) menurut Braithwaite mengatakan bahwa:

*“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musayawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.”* [[49]](#footnote-49)

Artinyaindonesia adalah negara dengan sumber daya *restorative justice* intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep *restorative justice* memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan di Sumatra Barat, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaiam masalah dengan pendekatan atau konsep *restorative justice* namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.[[50]](#footnote-50)

Praktik penyelesaian *restorative justice* yang dilakukan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota yaitu:

“Pada dasarnya praktik penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan konsep *restorative justice* sama dengan penyelesaian perkara tindak pidana lain pada umumnya. Biasanaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana mendepankan konsep *restorative justice* kami dari Kepolisian menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. “[[51]](#footnote-51)

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menimbang:

1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindakpidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukummasyarakat;
2. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidanayang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastianhukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
2. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
4. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
5. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
6. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
11. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
12. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
13. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
14. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
15. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
16. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
17. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
18. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
19. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa tahapan yang dilewati oleh para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di pengadilan sampai pada tahap putusan pengadilan. Pelaksanaan *restorative justice* mempunyai karekteristik adalah:

1. Melaksanakan identifikasi dan mengambil langkah supaya memperbaiki nilai kerugian yang ditimbulkan;
2. Mengikutsertakan semua pihak terkait (*stake holder*);
3. Upaya agar melaksanakan transformasi hubungan yang terjalin selama ini diantara masyarakat dengan pemerintah dalam menanggapi suatu tindak pidana.[[52]](#footnote-52)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota proses mendepankan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* yaitu:

“Proses penyelesaian dengan mendepankan pendekatan *restorative justice* meperhatikan kebutuhan korban dan pelaku secara bersamaan. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara dan menyampaikan dampak yang dirasakan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.”[[53]](#footnote-53)

*Restorative justice* hasil dari produk teori modern yang dikenal dengan hukum perlindungan sosial sehingga wajib menggantikan hukuman pidana dengan keadilan dari tujuan hukum yang terdiri keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[[54]](#footnote-54) Dalam perkembangan *restorative justice* dengan pemberdayaan pihak terkait seperti korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum yang dilaksanakan musyawarah agar tercapai mufakat sehingga pemulihan keadaan korban berupa ganti kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa tindak pidana.

Dengan demikian bahwa pendekatan *restorative justice* yaitu penyelesaian masalah agar meminimalisir supaya tidak terulanginya perbuatan merugikan yang dialami pihak korban dan menyadari pelaku konsekuensi dari tindakan mereka dan diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah mengulangi perbuatannya di masa depan. Modifikasi bentuk proses penyelesaian dengan restorative justice mempunyai berbagai mekanisme tertentu tergantung pada kondisi tertentu dalam diterapkan mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, melakukan pendampingan kepada korban, ganti kerugian, dan layanan masyarakat.

## Upaya Penyelesaian *Restorative Justice* Dapat Menjadi Alternatif Yang Lebih Baik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota tentang upaya apasaja yang diambil dalam pertimbangan penyelesaian *restorative justice* dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

“Upaya yang dapat diambil yaitu dengan melakukan mediasi yaitu musyawarah antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Tapi pertimbangan yang diambil itu kembali lagi kepada keputusan korban dengan pendampingan mediator yang terlatih. Intinya, *restorative justice* memberikan peran utama kepada korban, dan pelakunya tetap harus bertanggungjawab dan harus pula menyembukan luka batin sang korban, dan pelaku pun layak memperoleh hukuman agar mendapatkan efek jera walaupun dengan hukuman yang seringan mungkin.”[[55]](#footnote-55)

*Restorative justice* memiliki beberapa bentuk upaya dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya[[56]](#footnote-56):

1. Mediasi pelaku - korban (*victim - offender mediation*)

Mediasi pelaku - korban (*victim - offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku - korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

1. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional.

1. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)

Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku - korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh padabeberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota dan beberapa upaya *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang tertera di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Kepolisian sering menggunakan upaya mediasi pelaku - korban (*victim - offender mediation*) untuk menyelesaikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam hal ini, penerepan ini lebih bersifat aktif dan efektif dimana korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipertemukan untuk melakukan kesepakatan bersama dalam musyawarah hingga menghasilkan suatu penyelesaian bersama dengan dibantu atau didampingi mediator yang terlatih sebagai penengah untuk menemukan keputusan yang adil bagi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Mediasi adalah salah satu opsi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa disebut dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) secara umumnya dipergunakan dalam lingkungan perkara-perkara perdata, tidak hanya tanpa terkecuali perkara pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum positif di Indonesia hakikatnya perkara pidana tidak bisa diselesaikan di luar proses pengadilan, namun demikian dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk penyelesian perkara pidana di luar proses pengadilan.[[57]](#footnote-57)

Bentuk-bentuk *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) akan melewati beberapa metode yaitu:

a) Konsultasi.

b) Negosiasi.

c) Mediasi.

d) Arbitase.

e) Penilaian ahli.[[58]](#footnote-58)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota ada beberapa alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

“Alternatif yang dapat dilakukan pihak Kepolisian untuk mendepankan penyelesaian *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggaadalah mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, melakukan pendampingan kepada korban, ganti kerugian, dan layanan masyarakat.”[[59]](#footnote-59)

Demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota di atas, pihak Kepolisian berusaha mendepankan pendekatan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai cara sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pihak Kepolisian juga memberikan korban kendali penuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menciptakan hasil yang lebih memuaskan dan berkelanjutan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambatan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota yaitu:

“Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* beberapahambatan yang kami dapat yang pertama, ketidaksetujuan dari salah satu pihak. Kedua, keterbatasannya komunikasi kedua belah pihak. Ketiga, masalah keamanan atau ancaman yang diberikan pada korban. Keempat, kendala dalam kultur dan budaya masyarakat khususnya di Kota Sorong. Kelima, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi pihak kepolisian dalam melaksankan dan menarapkan konsep *restirative justice*. Dan yang terakhir, tidak adanya legalitas atau akta dari perkawinan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.”[[60]](#footnote-60)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota di atas tentang hambatan dalam pendekatan *restorative justice* untuk perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kendala kultur dan budaya sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menerapkan dan melaksanakan pendekatan *restorative justice*, hal ini dipengaruhi oleh beragam-ragam suku yang tingga di Kota Sorong. Sehingga pihak kepolisian harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *restorative justice* di lingkungan masyarakat. Legalitas dan akta perkawinan salah satu juga sebagai patokan utama sebelum menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana tindakan yang terjadi pada pasangan korban dan pelaku tidak memenuhi unsur ‘lingkup rumah tangga” disebabkan karena tidak adanya bukti akta perkawina korban dan pelaku. Maka sekalipun pelaku terbukti melakukan kekerasan terhadap korban baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Artinya bahwa hukum yang diterapkan tidak tepat kepada pelaku tindak pidana tersebut, dan pelaku tindak pidana tersebut harus dibebaskan dari ancaman hukuman yang diterapkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lebih tepat diterapkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Pada dasarnya tujuan dari pendekatan *restorative justice* itu sendiri dimana bertujuan untuk menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan oleh penegak hukum, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian melakukam pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, begitu pun juga masyarakat ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data laporan dan penyelesaian laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan yang dilimpahkan ke persidangan menunjukan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan yang dilimpahkan di persidangan. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota, pihak Kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian oleh pihak Kepolisian dilakukan umumnya pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak Kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Kantor Polres Sorong Kota atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian.

Adapun data laporan dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* oleh pihak Kepolisian Kota Sorong dan yang dilimpahkan pada persidangan berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Data Laporan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Laporan** | **Penyelesaian** | | **Selesai** | **Belum**  **Selesai** |
| **RJ** | **Limpah** |
| **2022** | 25 | 14 | 11 | 25 | 0 |
| **2023** | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| **Jumlah** | **36** | **18** | **11** | **29** | **7** |

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota

Berdasarkan data di atas dengan demikian bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak daripada dilimpahkan ke persidangan terlihat bahwa pada tahun 2022 dari 25 laporan, 14 laporan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan yang dilimpahkan ke persidangan 11 laporan. Sedangkan pada tahun 2023 dari 11 laporan, 4 laporan sudah terselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan 7 laporannya masih dalam proses penyelesaian dan belum ada laporan yang dilimpahkan ke persidangan pada tahun ini.

Berdasarkan data di atas pada prinsipnya, Kepolisian Resor Sorong Kota mendepankan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pendekatan *restorative justice*, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan *restorative justice* juga memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara dan menyampaikan dampak yang dirasakan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian bahwa pendekatan *restorative justice* bertujuan menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar meminimalisir supaya tidak terulanginya perbuatan merugikan yang dialami pihak korban dan menyadari pelaku konsekuensi dari tindakan mereka dan diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah mengulangi perbuatannya di masa depan.
2. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* dilihat dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota sangat efektif buat perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* sendiri memberikan perhatian pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini mengakui pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. *Restorative justice* memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan mereka, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memperkuat kesadaran akan keadilan dan memberikan korban kendali dalam penyelesaian perkara, sehingga menciptakan hasil yang lebih memuaskan dan berkelanjutan. Meskipun pendekatan *restorative justice* memiliki kelebihan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mengakui bahwa tidak semua perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai untuk pendekatan ini. Keamanan dan perlindungan korban harus tetap menjadi prioritas utama, dan dalam beberapa situasi, langkah-langkah penegakan hukum yang lebih tegas mungkin diperlukan. Secara keseluruhan, penerapan restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan alternatif yang bermakna untuk mendukung pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan kekerasan di masa depan.

## Saran

Saran yang dapat yanga dapat diberikan atas kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penegak hukum untuk mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mengedukasi masyarakat, lembaga peradilan, dan pihak terkait lainnya tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan manfaatnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mengubah paradigma dan mendorong penerapan *restorative justice.* Karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum sehingga harus memberikan perhatian lebih pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat antara korban dan pelaku.
2. Dalam proses *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumsh tsnggs, penting untuk memastikan partisipasi yang aktif dan kesetaraan antara korban dan pelaku. Korban harus diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pengalaman mereka, mempertimbangkan kebutuhan dan keselamatan korban, serta mengakui pentingnya pertanggungjawaban dan perubahan perilaku pelaku, sementara pelaku harus mengakui kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Fasilitator *restorative justice* perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi kedua belah pihak. Selain itu, perlindungan dan keamanan korban harus tetap menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan keselamatan mereka.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Syaufi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Samudra Biru (Anggota IKAPI)*, Yogykarta: Cet.Pertama

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

......................, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo,1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Semarang: Pustaka Magister

Dennis Sullivan and Larry Trifft, 2006, *Handbook Of Restorative Justice A Global Perspektif*, New York: Routletge

Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, 2008, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan.

Ida Hanifah, Dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: Pustaka Prima.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Jakarta: Alumni.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maman Rahman Hakim, 2017, *Hukum Perbankan* Syariah, Tanggerang Selatan: Faza Media.

Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

................, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mokhammad Najih, Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Universitas Diponegoro.

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.

Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

............................, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti.

Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

........................., 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 205 ayat (1) tentang Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Jurnal:**

Destri Tsurayya Istiqamah, 2018, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Vej, Vol. 4 No. 1

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, 2015, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Majalah Ilmiah Gema, Vol. 27 No. 49

Yuniar Ariefianto, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal IUS Vol. 9 No. 2

**LAMPIRAN**



1. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-2)
3. Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah,* Faza Media, Tanggerang Selatan, 2017, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-4)
5. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.24 [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-13)
14. Teguh Prasetya, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-16)
17. Moeljatno, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23 [↑](#footnote-ref-17)
18. Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta, 2002 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 166 [↑](#footnote-ref-19)
20. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 205 ayat (1) [↑](#footnote-ref-21)
22. Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, Majalah Ilmiah Gema, 2015, Vol. 27 No. 49, hlm. 1499 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hlm. 1499 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hlm. 1499 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Bandung, 1995, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-25)
26. Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 167 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, hlm. 173 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*, hlm. 176 [↑](#footnote-ref-28)
29. Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Vej, 2018, Vol. 4 No. 1, hlm. 205 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, hlm. 205-206 [↑](#footnote-ref-30)
31. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 [↑](#footnote-ref-33)
34. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-35)
36. Faqihuddin Abdul Kodir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-36)
37. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [↑](#footnote-ref-37)
38. Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 68 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-39)
40. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134 [↑](#footnote-ref-40)
41. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-41)
42. Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-43)
44. Dennis Sullivan and Larry Trifft, *Handbook Of Restorative Justice A Global Perspektif*, Routletge, New York, 2006, hlm. 356 [↑](#footnote-ref-44)
45. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, hlm. 356 [↑](#footnote-ref-46)
47. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-47)
48. Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 170 [↑](#footnote-ref-48)
49. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.109 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-50)
51. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-51)
52. Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 121 [↑](#footnote-ref-52)
53. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-53)
54. Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Samudra Biru (Anggota IKAPI)*, Yogykarta, Cet.Pertama, 2020, hlm.18 [↑](#footnote-ref-54)
55. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-55)
56. Yuniar Ariefianto, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal IUS Vol. 9 No. 2, hlm. 77-78 [↑](#footnote-ref-56)
57. Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-57)
58. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 [↑](#footnote-ref-58)
59. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-59)
60. Wawancara dengan Ipda Nelfince Rumbino sebagai Kepala Unit PPA Polres Sorong Kota Pada Tanggal 26 Mei 2023 Pukul 10:24 WIT [↑](#footnote-ref-60)